

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (BNPB, 2007)

Sistem Perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya memiliki wewenang untuk menentukan besar nya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (Ariffin & Sitabuana, 2022)

Kinerja Perekonomian Indonesia tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun pada 2023, meningkat 5,3% dibanding 2022. Capaian ini setara 112,6% dari target APBN 2023, atau 105,2% dari Perpres 75/2023. Provinsi Jambi menyumbangkan total realisasi penerimaan Pajak Negara mencapai Rp8,38 triliun selama tahun 2023. Data itu diungkap oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi. (*Realisasi Pendapatan Negara 2023 Dari Jambi Capai 8,38 Triliun*, 2024)

Salah satu sumber penerimaan pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menerangkan bahwa PPN dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB). Selain itu, PPN juga dikenakan terhadap siapapun yang melakukan impor BKP serta pemanfaatan JKP dan BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam transaksi yang mengandung PPN terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Kedua hal tersebut diperhitungkan untuk mencari jumlah pajak terutang dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. (Dana Ulfi Mahfuza, 2022)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK/03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak juga disebutkan jika kelebihan pembayaran pajak seperti PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dapat dikembalikan selama pajak tersebut lebih bayar atau seharusnya tidak terutang. SKPPKP adalah Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak merupakan sebuah surat keputusan untuk menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh yang melaporkan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang. Wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam SPT tahunan PPh/pajak masukan, yang dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran dalam SPT Masa PPN.

Dengan adanya peraturan terkait SKPPKP yang dijalankan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak sangat berpengaruh dalam akumulasi realisasi penerimaan Pajak Negara di Tahun 2023. Hal ini terlihat dari akumulasi total dari SKPPKP Provinsi Jambi tepatnya di KPP Pratama Jambi Pelayanan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jambi Pelayanan total akumulasi dari Pengembalian Pendahuluan Pajak sebesar Rp 230.082.521.997.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir “MEKANISME PENERBITAN SKPPKP DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAMBI PELAYANGAN”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang diatas, yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mekanisme penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan ?
2. Bagaimana evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari Laporan Magang ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu Perpajakan.
 - b. Media Penulis dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu Instansi/Lembaga.
 - c. Untuk mempersiapkan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III-Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
2. Bagi Instansi/Lembaga
- a. Guna memenuhi kebutuhan dan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dengan bidang ilmu yang ditekuni.
 - b. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan dengan lembaga pendidikan Program Studi Diploma III-Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Bagi Pihak Lain
- Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai Mekanisme penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan Laporan Magang ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan Penulis secara langsung dari sumbernya melalui Pegawai Kantor KPP Pratama Jambi Pelayangan dengan mengakses database dan mengolah data yang sehubungan dengan judul Laporan Magang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi , buku –buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, artikel dan jurnal internet serta peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik Pengumpulan Data yang dikumpulkan oleh Penulis adalah:

1. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.

2. Akses Sistem

Penulis mendapatkan data yang diperlukan dengan masuk ke jaringan database kantor dan mencari serta mengolah data yang diperlukan seputar permasalahan yang diangkat dalam laporan.

3. Data Kepustakaan

Dalam metode pengumpulan data ini, Penulis melakukan kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam laporan ini.

4. Browsing Internet

Proses pencarian data dari sekumpulan data yang sudah ada dengan menjelajahi dunia internet dalam mencari informasi dalam pembuatan Laporan Magang.

1.4.3 Metode Analisis

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Dimana data yang diperoleh disusun dengan kebutuhan analisis, dan kebutuhan kualitatifnya di analisis terhadap akumulasi realisasi penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 2,5 bulan yaitu tanggal 1 Februari 2024-19 April 2024
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361
Telpon : (0741) 62620

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini sangat memerlukan susunan atau sistematik penulisan. Sistematikan penulisan dibuat agar hal-hal yang dibahas di dalam laporan bisa diuraikan dengan jelas dan terarah. Dalam hal penulisan Laporan Akhir ini, Penulis membagi laporan ke dalam IV Bab yang setiap bagiannya membahas hal sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan.